

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era keterbukaan dan dinamika sosial serta ekonomi yang semakin rumit, pemerintah dituntut tidak hanya sekedar sebagai pelaksana kebijakan, namun juga sebagai institusi yang mampu menjamin *good governance*. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dapat diharapkan untuk mampu merespon kebutuhan warga, mengatur sumber daya dengan cara yang terbaik, dan melibatkan berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga, pemerintah tidak lagi memiliki kewajiban dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan negaranya, melainkan melalui interaksi masyarakat dan sektor swasta melalui prinsip *governance*. *Governance* dijalankan oleh beragam aktor organisasi dengan hubungan yang lebih adaptif, baik di tingkat vertikal maupun horizontal, dan di motivasi oleh nilai-nilai publik seperti kreativitas, daya tanggap, dan legitimasi (Natalia, 2022).

Perspektif *governance* modern yang dikembangkan oleh Osborne (2018), pemerintah ideal bertransformasi menjadi sistem kolaboratif, di mana pemerintah bukan lagi penyedia tunggal layanan publik melainkan fasilitator dan mitra warga. Dengan demikian, *co-production* menempati posisi sentral pada paradigma *governance* modern. Di mana warga negara atau aktor non pemerintah lainnya bersama pemerintah secara kolektif berpartisipasi dalam

merencanakan, mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi layanan publik (Brandsen et al., 2018).

Co-Production yang dikenal sebagai kolaborasi dalam produksi bersama, merupakan suatu sistem di mana pemerintah dan masyarakat berkolaborasi dan berbagi tanggung jawab dalam penyediaan layanan publik (Sukmayeti, 2021). Gagasan mengenai *co-production* menurut Governance International pada dasarnya sangat sederhana, yaitu penyediaan layanan publik yang dilakukan bersama masyarakat, bukan sekadar untuk masyarakat. Dengan demikian, layanan publik yang berorientasi pada kekuatan masyarakat menuntut adanya bentuk-bentuk baru dalam proses penyelenggaraannya, seperti keterlibatan masyarakat dalam perencanaan (*co-commissioning*), perancangan (*co-designing*), pelaksanaan (*co-delivering*), serta penilaian dan evaluasi layanan (*co-assessing*). Dalam konteks tersebut, *co-production* menawarkan pendekatan pelayanan publik yang tidak hanya melibatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga memanfaatkan kapasitas, pengetahuan, dan sumber daya yang dimiliki masyarakat untuk menyediakan layanan publik secara lebih inovatif. Selaras dengan Loeffler, yang mengungkapkan bahwa *co-production* dalam pelayanan publik merupakan kolaborasi antara para profesional dan masyarakat dalam menggunakan aset, sumber daya yang tersedia, serta berpartisipasi untuk mencapai hasil yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi.

CoProduction dapat dimaknai sebagai kombinasi antara tindakan suatu individu dan kolektif, di mana keduanya mampu mendorong inovasi sosial

melalui pendekatan yang berbeda. Asumsi utama dalam *co-production* yaitu untuk mengatasi masalah yang kompleks, keahlian ilmiah saja tidak cukup dan kontribusi dari pihak-pihak yang berkepentingan sangat krusial guna menciptakan pengetahuan yang tidak hanya berkualitas secara ilmiah, tetapi juga memiliki kekuatan dalam aspek sosial (Turnhout et al., 2020). Inovasi sosial dapat dilihat sebagai elemen dalam proses *co-production*, di mana transformasi dicapai melalui kerja sama yang mengarah pada munculnya konsep-konsep baru, penguatan kapasitas para pelaku, serta terciptanya pengaruh sosial (Perikangas et al., 2024). Dalam perspektif *co-production in social innovation pathways*, proses inovasi sosial dipahami sebagai jalur kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor dalam menciptakan dan mengembangkan solusi atas permasalahan sosial. Ayob et al. (2016) menjelaskan bahwa *co-production* merupakan salah satu jalur inovasi sosial yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penciptaan solusi serta terjadinya perubahan hubungan antara penyedia layanan dan pengguna layanan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai mitra yang turut berkontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan inovasi. Oleh karena itu, inovasi sosial mencakup penciptaan solusi yang inovatif dan berkelanjutan untuk menangani serta meningkatkan berbagai isu sosial, lingkungan, dan tantangan kemanusiaan (Sunarjo, 2024).

Pendidikan menjadi aspek penting dalam membangun peradaban suatu negara. Setiap negara memiliki sistem pendidikan yang disesuaikan oleh

keadaan masing-masing dan kemampuan dari negara tersebut. Dengan adanya pendidikan yang berkualitas akan memberikan dampak pada suatu negara untuk berkembang dan bersaing di era globalisasi. Setiap negara memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan bahwa sistem pendidikan nasional bukan sekedar menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran secara teknis, tetapi juga berfungsi sebagai pilar utama dalam mewujudkan prinsip *good governance* (Khotimah et al., 2022). Dengan demikian, pendidikan menjadi salah satu cara untuk mewujudkan generasi penerus yang lebih baik atau dapat menjadi panutan untuk generasi selanjutnya (Zaifullah et al., 2023)

Di Indonesia, pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” dan ayat 2 menegaskan “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Dalam hal ini, menunjukkan bahwa pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa dapat membangun fondasi sosial yang kokoh untuk menegakkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga mitra aktif untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan Pendidikan pada UU No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem pendidikan Nasional pasal 13 mengindikasikan bahwa pemerintah mengelola pendidikan melalui tiga jalur yaitu formal, nonformal, dan informal. Pada pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa jenis pendidikan tersebut terdiri dari pendidikan formal, nonformal, dan informal yang saling mengisi satu sama lain. Di pasal 26 ayat 2, dijelaskan bahwa pendidikan nonformal berperan dalam

mengoptimalkan potensi siswa dengan fokus pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang praktis, serta pengembangan sikap dan karakter yang positif. Sebagai upaya pendukung dalam pendidikan formal, pendidikan nonformal menjadi peran yang strategis dalam menyediakan ruang belajar yang lebih fleksibel dan responsif terhadap masyarakat.

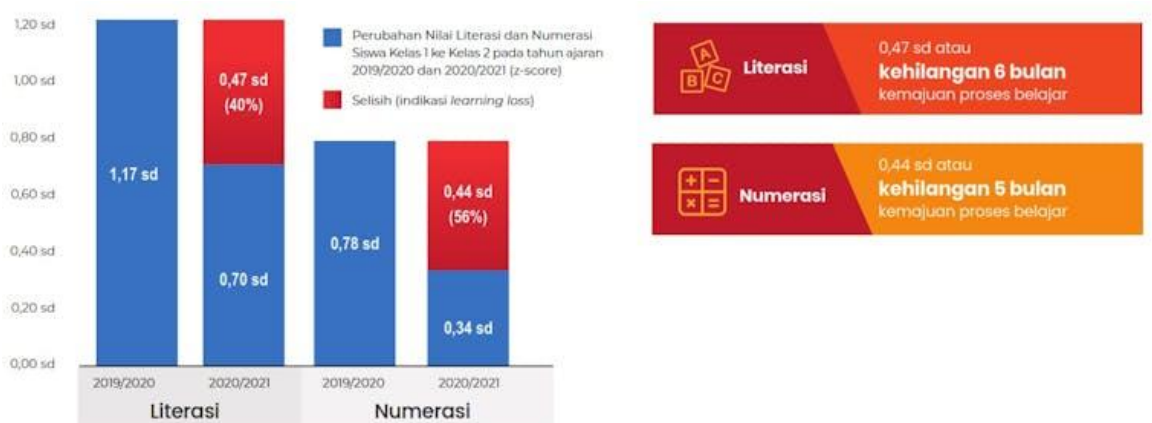
Pendidikan Nonformal (PNF) merupakan salah satu alternatif pendidikan yang hadir dengan konsep kemasyarakatan. Pendidikan nonformal digunakan untuk membentuk perilaku produktif, meningkatkan keterampilan dan membendung arus urbanisasi. Terdapat berbagai satuan pendidikan dalam pendidikan nonformal, seperti lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan satuan pendidikan sejenisnya. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 mengenai Pembentukan Satuan Pendidikan Nonformal, satuan pendidikan nonformal ini dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya bagi masyarakat (Lukman, 2021). Pendidikan nonformal dimaksudkan untuk menyediakan pembelajaran di luar sistem pendidikan formal yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sehingga, pendidikan nonformal memberikan pilihan kepada individu yang ingin mengejar pendidikan secara fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan individu itu sendiri (Irsalulloh & Maunah, 2023).

Partisipasi masyarakat diperlukan dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal, salah satunya melalui pendidikan nonformal. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 mengenai Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan

nonformal dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan demikian, regulasi ini memperjelas bahwa masyarakat bukan hanya objek tetapi bisa menjadi pelaku dan penyelenggara dalam pendidikan nonformal. Menurut Cohen dan Uphoff 1997 dalam (Bone et al., 2023) yang menyatakan bahwa partisipasi meliputi peran masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Pandangan ini sejalan dengan pendapat menurut Mubyarto 1996 dalam (Sastradi et al., 2023) yang di mana bahwa partisipasi adalah kesiapan dan kontribusi masyarakat untuk mendukung keberhasilan program pembangunan, baik melalui ide, tenaga, maupun sumber daya material. Dengan ini keterlibatan masyarakat akan menjadi pengaruh besar dalam keberhasilan suatu komunitas yang berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2025-2029 menyebutkan sejumlah permasalahan yang dapat menghambat pembangunan manusia, salah satunya pada rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Kondisi semakin diperparah oleh adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2021. Kebijakan pemerintah yang tercantum pada Surat Edaran Mendikbud No. 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Indonesia dan mendorong seluruh elemen pendidikan agar dapat melakukan pembelajaran secara daring atau jarak jauh. Sehingga dapat menyebabkan terjadinya learning loss dan menimbulkan dampak dari berbagai aspek seperti akademik, psikologis, maupun sosial-ekonomi. *Learning loss* merupakan keadaan yang di mana peserta didik mengalami kemunduran dalam kemampuan dasarnya seperti membaca pemahaman, berhitung, dan

pemecahan masalah, serta keterampilan baik secara umum maupun khusus (Ndasung, 2021). Fenomena tersebut dapat dilihat dari penurunan skor literasi dan numerasi pada peserta didik Indonesia, khususnya pada jenjang Sekolah Dasar kelas awal. Dampak ini tidak hanya berlangsung sementara, namun juga dapat mengakibatkan efek yang bertahan lama terhadap kualitas sumber daya manusia dan kapasitas pembelajaran di masa depan. Hal ini sesuai dengan gambar dibawah ini :



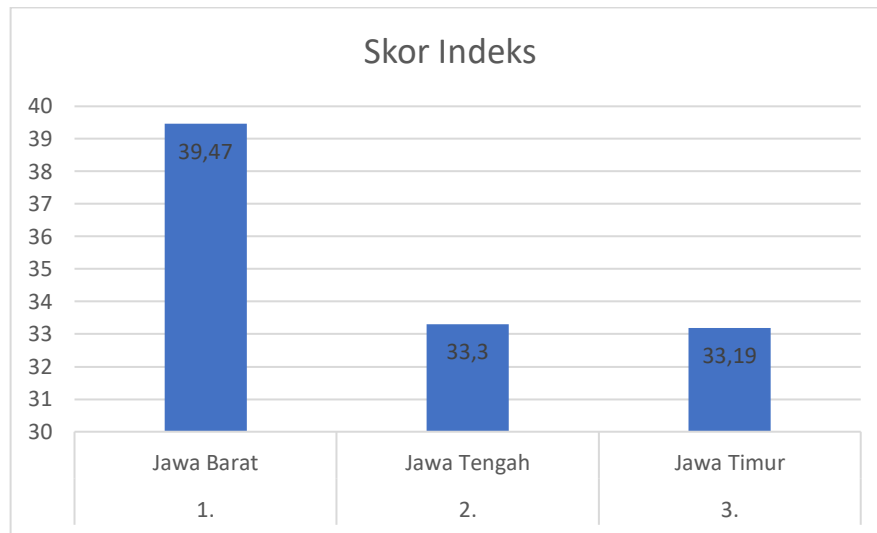
Gambar 1. 1 Perubahan Skor Literasi dan Numerasi Siswa dari Kelas 1 ke Kelas 2

Sumber : pskp. Kemendikdasmen.go.id (diakses 31 Oktober 2025)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa terjadi perubahan skor literasi dan numerasi peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar kelas awal di Indonesia dari kelas 1 ke kelas 2. Standar deviasi (sd) menjadi ukuran statistik yang digunakan untuk melihat seberapa besar variasi atau penyebaran data dari nilai rata-ratanya pada capaian antar tahun. Satu tahun setelah pandemi Covid-19, siswa mengalami kehilangan pembelajaran yang setara dengan enam bulan

pembelajaran (atau 0,47 sd) untuk literasi dan lima bulan pembelajaran (atau 0,44 sd) untuk numerasi. Dengan kata lain, satu tahun setelah pandemi kemajuan pembelajaran siswa dari kelas 1 ke kelas 2 lebih lambat lima sampai enam bulan dibandingkan dengan konteks pra-pandemi. Namun, dua tahun pascapandemi, dibandingkan dengan capaian pembelajaran tahun ajaran sebelumnya, capaian pembelajaran tahun ajaran sebelumnya, capaian pembelajaran 2021/2022 menunjukkan pemulihan pembelajaran setara dengan dua bulan pembelajaran (atau 0,16 sd untuk literasi dan 0,12 sd untuk numerasi). Sehingga perkembangan siswa hanya tiga hingga empat bulan lebih lambat dibandingkan dengan situasi sebelum pandemi (Sukoco et al., 2023)

Aktivitas literasi membaca pada setiap provinsi di Indonesia menunjukkan tingkat perkembangan yang beragam, dengan dipengaruhi oleh kualitas layanan pendidikan, ketersediaan sarana literasi, serta lingkungan sosial dan budaya yang membentuk kebiasaan membaca masyarakat (Agustina, 2021). Dengan demikian Indeks Aktivitas Membaca Literasi Nasional, yang dikenal sebagai Indeks Alibaca merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk memahami situasi literasi membaca di masyarakat secara menyeluruh.



Gambar 1. 2 Indeks Alibaca Pulau Jawa di Indonsia dari Tingkat Tinggi ke Rendah

Sumber : pskp kemendikdasmen (diakes 14 November 2025)

Pada gambar 1.2 menunjukkan bahwa dalam konteks regional di Pulau Jawa, provinsi dengan indeks literasi tertinggi adalah Jawa Barat, dan Jawa Tengah menduduki posisi kedua di Pulau Jawa yang memiliki indeks alibaca dengan kategori rendah. Sedangkan Provinsi Jawa Timur berada pada kelompok dengan kategori paling rendah se-Pulau Jawa, dengan skor 33,19 yang di mana menunjukkan bahwa aktivitas literasi membaca masyarakat di Jawa Timur masih belum optimal, baik dari aspek ketersediaan fasilitas literasi, budaya baca, maupun partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat program peningkatan literasi melalui pendekatan yang lebih inklusif.

Dilansir pada laman web JawaPos.com tahun 2025, terdapat beberapa kota yang mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak di Provinsi Jawa Timur. Kota Surabaya menjadi salah satu kota yang mendapatkan penghargaan

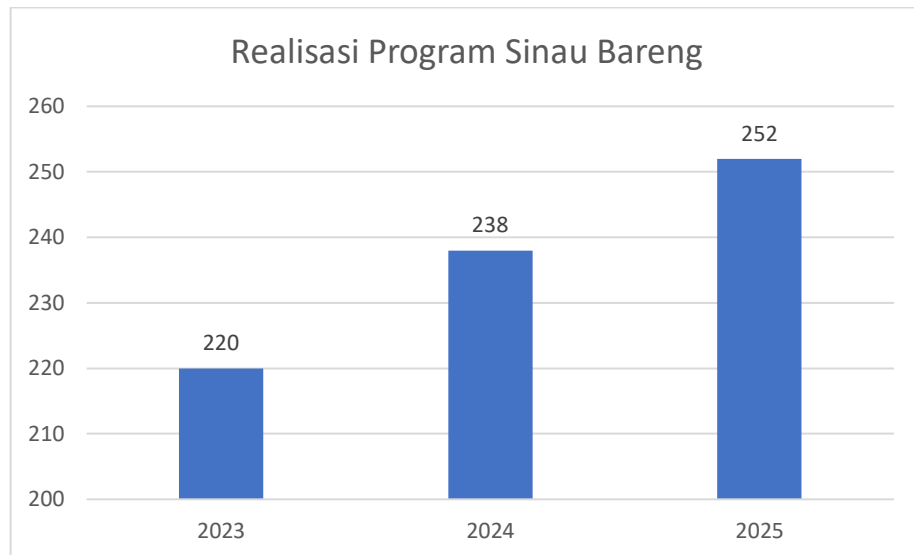
peringkat utama sebagai Kota Layak Anak (KLA) dan ketujuh kalinya mendapatkan penghargaan tersebut dalam memenuhi hak-hak anak dengan menyediakan ruang aman, edukatif, dan inklusif bagi anak-anak untuk berkembang. Kota Surabaya mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) dengan melalui inovasi sosial.

Inovasi sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya diwujudkan melalui berbagai sektor pembangunan, salah satunya pada pendidikan nonformal. Dengan melibatkan pusat kegiatan belajar masyarakat dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat. Salah satu bentuk inovasi sosial dalam pendidikan nonformal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya yaitu Program Sinau Bareng yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 136 Tahun 2023 tentang Daftar Inovasi Daerah. Pemerintah Kota Surabaya mengembangkan inovasi sosial tersebut berorientasi pada pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kualitas pendidikan nonformal secara berkelanjutan.

Program Sinau Bareng diresmikan oleh Wali Kota Surabaya pada tahun 2022, dengan peluncuran awal pada 2 September 2022, sebagai salah satu inovasi daerah dalam pendidikan nonformal yang dinaungi oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat seperti mahasiswa, guru, kader, karang taruna dan masyarakat sekitar untuk peduli terhadap sistem pendidikan di Kota Surabaya melalui penciptaan pusat kegiatan belajar masyarakat. Program ini diluncurkan sebagai bentuk solusi

dari Pemerintah Kota Surabaya untuk mengatasi masalah learning loss akibat pandemi Covid-19, serta memberikan dampak yang buruk secara pengetahuan, keterampilan dan sikap. Program Sinau Bareng dirancang sebagai inovasi pembelajaran berbasis kewilayahan yang sekaligus menjadi wadah pengembangan keterampilan anak-anak secara positif, kreatif, dan produktif. Serta membantu fasilitas dan mendampingi anak dalam belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan di sekolah. Program ini dapat diikuti oleh anak-anak dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, hingga SMP tanpa dikenakan biaya.

Program Sinau Bareng menunjukkan perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun dengan perluasan jangkauan yang semakin merata di wilayah Kota Surabaya. Pada 2 September 2022 di awal peresmian, program ini telah terlaksana di 22 Balai RW yang tersebar di 12 kecamatan. Kemudian diresmikan kembali pada 2 September 2023 dengan jangkauan yang lebih luas menjadi 220 titik Balai RW yang tersebar di 31 kecamatan. Perkembangan terus terjadi, pada tahun 2024 jumlah titik pelaksanaan menjadi 238 Balai RW.



Gambar 1. 3 Realisasi Titik Balai RW Program Sinau Bareng

Sumber : Surabaya.go.id, 2024

Pada gambar 1.3 menunjukkan perkembangan jumlah Balai RW sebagai lokasi penyelenggaraan program Sinau Bareng di Kota Surabaya yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah tersebut kemudian mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2025, berdasarkan data yang tercantum di laman resmi sinau bareng, terdapat 252 Balai RW di 31 kecamatan yang telah menjadi lokasi penyelenggaraan kegiatan. Angka yang mencerminkan jangkauan program yang semakin luas serta respon positif dari masyarakat.

Program Sinau Bareng yang telah diresmikan kedua kali oleh Wali Kota Surabaya pada 2 September 2023 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2025. Menurut (Surabaya.go.id, 2022) pengesahan dilakukan dua kali dikarenakan terdapat penambahan jumlah lokasi di beberapa kelurahan di Kota Surabaya. Salah satu kelurahan yang diresmikan oleh Walikota Surabaya

langsung pada tahap awal peluncuran Program Sinau Bareng pada tahun 2022 adalah Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kelurahan Tenggilis Mejoyo RW 06. Kelurahan ini ditetapkan sebagai salah satu kelurahan yang menjadi *pilot project* program Sinau Bareng di Kecamatan Tenggilis Mejoyo. Penetapan Kelurahan Tenggilis Mejoyo RW 06 sebagai *pilot project* didasarkan pada kesiapan masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi aktif dalam menyediakan layanan. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat akan mendukung keberlanjutan program tersebut secara efektif dan berjalannya proses *co-production*.

Pelaksanaan program Sinau Bareng di Kelurahan Tenggilis Mejoyo RW 06 berlangsung secara rutin dan terjadwal sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pembelajaran bagi anak-anak di lingkungan setempat. Kegiatan Sinau Bareng dilaksanakan setiap hari Senin dan Sabtu pada pukul 18.00-20.00, sehingga memungkinkan siswa untuk mengikuti pembelajaran di luar jam sekolah formal. Program ini diikuti oleh siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, hingga SMP yang menunjukkan bahwa kegiatan tersebut mampu menjangkau kelompok usia yang beragam. Proses pembelajaran tersebut di dukung dengan pendampingan oleh para fasilitator yang berperan dalam memberikan pendampingan akademik, membantu memahami materi pelajaran, serta menciptakan suasana belajar yang kondusif. Fasilitator menjadi elemen penting dalam memastikan kualitas pembelajaran tetap terjaga, sehingga program ini dapat berjalan efektif sesuai tujuan dari program Sinau Bareng tersebut.

Berbanding terbalik dengan awal pelaksanaan program Sinau Bareng, terdapat permasalahan yang ditemukan dalam program Sinau Bareng di Kelurahan Tenggilis Mejoyo RW 06 yang dapat menghambat berjalannya program tersebut. Permasalahan tersebut disampaikan langsung oleh Koordinator Sinau Bareng di Kelurahan Tenggilis Mejoyo RW 06, menyatakan bahwasannya terdapat masalah dalam keterlibatan partisipasi masyarakat sebagai fasilitator. Selain itu, keterbatasan fasilitas sebagai media belajar dalam program Sinau Bareng di Kelurahan Tenggilis Mejoyo RW 06 yang dapat menghambat proses pembelajaran menjadi kurang optimal.

“...Memang pada saat awal program ini dibuat, anggota fasilitator dan jumlah murid yang mengikuti banyak, tetapi seiring berjalannya waktu semakin berkurang terutama anggota fasilitatornya karena banyak yang gak hadir. Awalnya terdapat kurang lebih 33 fasilitator, tetapi pada saat program berjalan hanya terdapat beberapa fasilitator saja yang hadir . Selain itu, keterbatasan fasilitas juga jadi permasalahan....” (Hasil wawancara, 15 September 2025).

Selain hasil wawancara diatas yang menunjukkan kurangnya partisipasi masyarakat sebagai fasilitator, juga terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Data Fasilitator Terdaftar dan Kehadiran Fasilitator Sinau Bareng di Kelurahan Tenggilis Mejoyo RW 6

No	Fasilitator	Jumlah Fasilitator Terdaftar Tahun 2024	Jumlah Kehadiran Fasilitator	
			2024	2025
1.	Guru	10	10	7
2.	Kader	5	5	3
3.	Koordinator Program	2	2	2
4.	Mahasiswa	10	7	2
5.	Karang Taruna	6	3	-
Total Jumlah		33	27	14

Sumber : Koordinator Sinau Bareng Tenggilis Mejoyo RW 06 (diolah oleh peneliti, 2025)

Pada tabel 1.1 data yang ditampilkan setidaknya terdapat 33 fasilitator yang terdaftar pada program Sinau Bareng di Kelurahan Tenggilis Mejoyo RW 06 tahun 2024. Namun, didasarkan pada hasil wawancara pra penelitian dengan koordinator Sinau Bareng Kelurahan Tenggilis Mejoyo RW 06 dan didukung oleh data dari daftar hadir fasilitator Sinau Bareng menyatakan bahwasannya secara keseluruhan tidak semua fasilitator Sinau Bareng tersebut hadir dalam program Sinau Bareng. Pada tahun 2024 fasilitator yang mengikuti Sinau Bareng secara rutin sekiranya kurang lebih dengan jumlah 27 fasilitator dan pada tahun 2025 kehadiran fasilitator terus mengalami penurunan dengan jumlah kehadiran 14 fasilitator. Dengan demikian, tidak konsistennya fasilitator terdaftar dan kehadiran menjadi kendala yang serius pada pelaksanaan program Sinau Bareng tersebut. Rendahnya partisipasi masyarakat sebagai fasilitator Sinau Bareng di Kelurahan Tenggilis Mejoyo RW 06 dipengaruhi oleh faktor utama yaitu keterbatasan waktu akibat aktivitas pekerjaan yang membuat masyarakat tersebut sulit untuk meluangkan waktu untuk terlibat secara sukarela. Berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator Sinau Bareng Kelurahan Tenggilis Mejoyo RW 06, yang menyatakan bahwa jumlah partisipisan yang lebih banyak dibandingkan fasilitator yang hadir. Sehingga terjadi penumpukan pada saat proses pembelajaran yang dapat berdampak pada fokus peserta didik dalam belajar dan efektivitas pada program tersebut.

Tabel 1. 2 Data Partisipan Sinau Bareng di Kelurahan Tenggilis Mejoyo RW 6 Tahun 2025

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	7
2.	Sekolah Dasar (SD)	7
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2
Total Jumlah		16

Sumber: Koordinator Sinau Bareng Tenggilis Mejoyo RW 06 (diolah peneliti, 2025)

Kurangnya keterlibatan masyarakat sebagai fasilitator dalam program Sinau Bareng menjadi aspek yang sangat krusial untuk diperhatikan terutama dalam tahap pengembangan suatu program. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa partisipasi masyarakat dapat memengaruhi keberhasilan program Sinau Bareng di Kelurahan Tenggilis Mejoyo RW 06. Oleh karena itu, Sinau Bareng adalah salah satu inisiatif inovasi sosial yang dapat diselaraskan dengan teori *Co-Production*.

Pada konteks pendidikan nonformal, konsep *co-production* menjadi penting dengan menekankan kolaborasi antara pemerintah, tenaga pendidik, masyarakat, dan peserta didik dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan. Penerapan *co-production* dalam bidang pendidikan merupakan salah satu strategi untuk memperkuat implementasi *good governance*, melalui keterbukaan masyarakat dalam berpartisipasi untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara berkeadilan sesuai dengan kebutuhan di lapangan (Rubalcaba, 2022). Dengan demikian, pendidikan nonformal tidak hanya menjadi ruang transfer pengetahuan, tetapi juga menjadi suatu lingkup pemberdayaan bersama yang memungkinkan para pemangku

kepentingan berkontribusi aktif dalam menciptakan solusi yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat permasalahan pada partisipasi masyarakat sebagai fasilitator dalam program Sinau Bareng di Kelurahan Tenggilis Mejoyo RW 06. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan pada proses *co-production*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Candrawulan et al., 2025) kajian tersebut menganalisis mengenai kolaborasi Pemkot Surabaya dan Mahasiswa dalam menjalankan program Sinau Bareng di Kelurahan Karangpilang. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Ghozalyfah & Ratnawati, 2024) yang mengkaji bahwa implementasi program Dinas sebagai pendidikan Sinau Bareng Kota Surabaya dapat meningkatkan kreativitas belajar. Kedua penelitian tersebut umumnya berfokus pada implementasi dan kolaborasi program Sinau Bareng. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bentuk keterlibatan aktif masyarakat sebagai fasilitator dalam program Sinau Bareng di Kelurahan Tenggilis Mejoyo sebagai perwujudan kegiatan yang berbasiskan dengan *co-production* pada pendidikan nonformal dengan menggunakan pendekatan *Social Innovation Pathways and Drawing The Link to Co-Production* yang dikemukakan oleh Ayob et al., (2016) yang terdiri dari *New Ideas* (generasi ide-ide baru), yaitu terkait dengan inovasi lanjutan yang ada dalam Program Sinau Bareng. *Empowerment* (pemberdayaan), yaitu terkait dengan pemberdayaan dan bimbingan-bimbingan yang diberikan kepada fasilitator Sinau Bareng. *Change* (perubahan) yaitu yang mengarah pada perubahan dalam sosial.

Keterbaharuan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya keterlibatan proses *co-production* pada inovasi daerah yaitu pendidikan nonformal dalam program Sinau Bareng. Dengan demikian, penelitian ini berjudul **“Co-Production Dalam Program Sinau Bareng Di Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang, maka perlunya dilakukan penelitian dengan rumusan masalah “Bagaimana *Co-Production* dalam Program Sinau Bareng di Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis *co-production* dalam program Sinau Bareng di Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat, termasuk peneliti itu sendiri dan pihak-pihak yang memang memiliki kaitan dengan penelitian tersebut. Khususnya bagi kalangan akademisi dan masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam bagaimana cara kerja *co-production* dalam program Sinau Bareng di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya.

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam meningkatkan pengelolaan pemerintahan, khususnya mengisi celah literatur *co-production* dalam konteks pendidikan nonformal berbasis komunitas. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengertian yang berguna bagi penelitian di masa depan, khususnya dalam memahami konsep *co-production* dalam Program Sinau Bareng di Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya.

1.4.2 Secara Praktis

a. Untuk Peneliti

Menjadi acuan empiris dalam mengkaji penerapan *co-production* di sektor pendidikan dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

b. Untuk Universitas/Perguruan Tinggi

Sebagai tambahan data, informasi dan referensi yang berguna bagi seluruh mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur.

c. Untuk Instansi/Dinas/Organisasi/Pihak Lainnya

Sebagai informasi tambahan dan kontribusi yang diberikan kepada seluruh instansi terkait, termasuk Kelurahan Tenggilis Mejoyo, pendamping program Sinau Bareng di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, serta kelompok atau masyarakat terkait. Ini bisa menjadi masukan yang penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembangunan.